

## PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA

Paisol Burlian

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email : [burlianpaisol@yahoo.co.id](mailto:burlianpaisol@yahoo.co.id)

### Abstrak

Dalam proses perumusan Pancasila dilakukan melalui beberapa tahapan persidangan, banyak tokoh yang dimasukkan di dalamnya seperti Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun dari ketiga tokoh tersebut, hanya pemikiran Soekarno yang mendapat apresiasi dari peserta secara aklamasi dan Pancasila yang dianggap sebagai keunggulan pemikiran Soekarno menjadi sesuatu yang berbeda dalam tatanan dan terminologi. Padahal sebelum Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Muh. Yamin dan Soepomo sebelumnya pernah berpidato dan memiliki kemiripan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi kualitatif dengan studi pustaka, dengan menganalisis secara detail pada beberapa literatur yang relevan. Dengan menggunakan teori dekonstruksi milik Jacques Derrida dengan konsep trace, difference, reconstruction, dan iterability. Sedangkan sumber data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Rumusan Pancasila Soekarno terdiri dari lima prinsip sebagai berikut; 1) Pemikiran nasionalisme, Soekarno bermaksud untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia agar dapat berdiri tegak. 2) Pemikiran internasionalisme, Soekarno bermaksud mengaitkan erat antara pemikiran internasionalisme dengan nasionalisme. 3) Pemikiran demokrasi, dengan demikian Soekarno yakin bahwa alasan mutlak untuk memperkuat negara Indonesia adalah pemikiran konsultatif dan representatif. Jadi dengan musyawarah kita bisa memperbaiki semuanya, termasuk keselamatan beragama. 4) Pemikiran kesejahteraan, dengan demikian Soekarno bermaksud untuk mengentaskan kemiskinan dari Indonesia, dengan mensinergikan demokrasi negara Indonesia dapat membawa rakyat untuk hidup sejahtera. 5) Pemikiran ketuhanan, Soekarno bermaksud agar ketuhanan bukan berarti memiliki Tuhan. Namun setiap masyarakat Indonesia bisa beribadah kepada tuhan yang bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan agamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Soekarno berakar dari rasa nasionalisme yang ingin agar bangsa Indonesia hidup berdampingan dalam damai dan sejahtera, serta mengintegrasikan semua unsur. Hasil Analisa; Pancasila merupakan hasil akhir pemikiran yang diperoleh dari sumbangan Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi kebangsaan, ketuhanan, hubungan kebangsaan dan demokrasi. Dengan demikian kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya pemikiran Soekarno.

**Kata kunci:** Pemikiran, Soekarno, Rumusan, Pancasila

### Abstract

In the process of Pancasila formulation through a few steps of investigation court, many of prominents included in it like Muh. Yamin, Soepomo, and Soekarno. But from the three prominents, only Soekarno's thought obtained appreciation from the audience acclamatically and Pancasila was regarded as the preference of Soekarno's thought became something different in the order and terminology. Yet in the fact before Soekarno made a speech on June 1st, 1945, Muh. Yamin and Soepomo had formerly made speeches and if they had the similarities with one another. This research used a type of phenomenology qualitative with library research, by analyzing in detail to some relevant literatures. By using deconstruction theory belonging to Jacques Derrida with trace, difference, reconstruction, and iterability concepts. While the data sources were taken from primary and secondary ones. And the technics in this research are heuristic, verification, interpretation, and historiography. Soekarno's Pancasila formulation achieved five principles as follows; 1) nationalism thought, Soekarno intended to awaken nationalism spirit among the Indonesian people in order to stand for freedom. 2) Internationalism thought, Soekarno intended to relate tightly between internationalism to nationalism thoughts. Both were mutually qualifying and to preserve plurality among the Indonesian people, as well as to establish nepotism among us. 3) Democracy thought, with this Soekarno was

confident that the absolute reason to strengthen Indonesian state was thought consultative and representative. Thus with consultation we could repair everything, including religion salvation. 4) Welfare thought, with this Soekarno intended to eliminate poverty from Indonesia, by synergizing democracy the Indonesian state could bring the people to live in welfare. 5) Divinity thought, Soekarno intended that divinity was not meant by having God. But each of the Indonesian people could worship to their god and free to embrace a religion according to their religious beliefs. Thus we can conclude that the Soekarno's thought was rooted from nationalism wanting the Indonesian people to live side by side in peace and welfare, and to integrate all elements. Analysis result; Pancasila was the final result of investigation carried out achieved from the contribution by Muh. Yamin, Soepomo, and Soekarno. The three prominent figures had similar points of views about nationalism ideology, divinity, national relationship and democracy. Thus we cannot conclude that Pancasila was the only thought of Soekarno.

**Key words : Thought, Soekarno, formulation, Pancasila.**

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila yang mengatur pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila. Hal ini artinya semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.<sup>1</sup> Sebagai ideologi negara maka Pancasila haruslah menjadi sumber tatanan hidup dalam berbangsa. Yang dalam hal ini makna ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*). Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau

kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.<sup>2</sup>

Pancasila sebagai dasar filsafat secara ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Kemudian para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama,

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, 2013, hlm. 70

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>3</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi*, hlm. 61

sidang panitia sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang resmi PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilaksanakan melalui hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh. Yakni dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam hal ini diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Badan ini terdiri dari 68 anggota, dengan komposisi; 8 orang Jepang, 15 orang dari golongan Islam, dan selebihnya dari golongan nasionalis ditambah golongan priyayi atau aristokrat Jawa.<sup>5</sup>

Tokoh penggagas lahirnya Pancasila adalah Prof. Mohammad Yamin S.H, Prof.

---

<sup>4</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm 61

<sup>5</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, cet. II, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1985, hlm. 102

Mr. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI pertama aspirasi mereka menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Dalam proses pembentukan seputar ideologi negara terjadi perdebatan sengit antar golongan. Yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis. Soekarno merupakan salah satu pendiri (*founding fathers*) yang dalam kaitannya dengan ini Soekarno dan NU dan para pendiri negara sadar betul bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direbut melalui berbagai perjuangan, pemberontakan, peperangan griliya, peperangan terbuka dan diplomasi, tidak dimaksudkan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah atau Negara Islam, melainkan mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.<sup>6</sup> Untuk itu Soekarno meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler supaya mengajukan formula yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing-masing. Diantara tokoh-tokoh Islam banyak yang menghendaki negara sepenuhnya bercorak Islam. Sedangkan umat Kristiani dan Hindu serta kaum Nasionalis sekuler menginginkan bahwa usaha mengislamkan negara akan mencetuskan keresahan

---

<sup>6</sup> Zainal Abidin Amir, *Soekarno dan NU Titik Temu Nasionalisme*, Yogyakarta: LkiS, 2013, hlm. 120

dibagian timur Indonesia dan daerah lain non-Muslim lainnya.<sup>7</sup>

Soekarno sebagai salah satu *founding father* juga dikenal sebagai penggali Pancasila, tak dapat disangkal bahwa Soekarno sumber pertama yang memperkenalkan Pancasila pada bangsa ini. Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itulah yang menjadi rujukan awal yang jadi dasar formulasi tata urutan sila-sila (prinsip) dari Pancasila yang dikenal saat ini.<sup>8</sup> Memang urutan uraian tentang sila-sila (prinsip) dari Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 berbeda dengan tata urutan sila-sila sebagaimana tercantum dalam dokumen berikutnya, seperti pada piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, di dalam pembukaan UUD 1945, mau pun dalam pidato-pidato Soekarno sebagai “Key person” dalam rumusan Pancasila perlu memahami logika pemikiran Soekarno yang sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman sejarah kehidupan bangsa ini.<sup>9</sup>

Dari beberapa tokoh *founding father* seperti M. Yamin, Sopoemo dan Soekarno

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 121

<sup>8</sup> Bernhard Dham, *Soekarno dan Perjuangan*. Terj. Hasan Basari, Jakarta:LP3ES, 1987, hlm xii

<sup>9</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm.72

yang telah menyampaikan pidatonya pada rapat BPUPKI telah mendapatkan respon yang berbeda, diantara tiga tokoh tersebut pemikiran Soekarnolah yang dianggap hasil pemikiran sintesis yang dianggap paling penting. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai preferensi dari pemikiran Soekarno yang terdiri dari lima prinsip yakni *Kebangsaan, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan*. Maka dari sini apakah Soekarno dapat dikatakan benar-benar perumus pertama dari sila itu? Karena tiga hari sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal itu, Muhammad Yamin telah menyampaikan pada tanggal 29 Mei 1945, di depan sidang Badan Penyelidik itu lima asas sebagai dasar bagi Indonesia Merdeka sebagai berikut: *peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat*.<sup>10</sup>

Tidak terdapat perbedaan fundamental antara lima asas Yamin dan lima sila Soekarno tersebut. perbedaan hanya dalam istilah yang digunakan untuk “demokrasi” dan dalam susunan atau urutan asas-asas tersebut.<sup>11</sup> Mohammad Roem, seorang pemimpin terkenal *Masyumi* memandang “Tema dari kedua pidato itu

---

<sup>10</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 18

<sup>11</sup>*Ibid*

sama, jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima, malah sama juga panjangnya pidato, yaitu dua puluh halaman dalam ‘naskah’ tersebut.<sup>12</sup>

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kini dikenal sebagai lahirnya Pancasila tersebut terdapat titik tolak pada urutan Pancasila. terutama mengenai sila “Ketuhanan” sebagai sila-V dan kemudian menjadi sila pertama dalam tata urutan Pancasila diberbagai dokumen berikutnya. Namun untuk memahaminya dengan mendalam jelas perlu memahami alur pemikiran Soekarno tentang Ketuhanan.<sup>13</sup> Masalah penempatan “prinsip Ketuhanan” pada urutan terakhir ini kerap menjadi pertanyaan oleh berbagai pihak, sementara prinsip 6 Kebangsaan pada urutan pertama. Oleh karena itu Soekarno dinilai seorang nasionalis sekuleris. Tetapi, penilaian seperti ini kerap terbantahkan jika melihat alur pemikiran Soekarno di berbagai tulisan dan pidatonya, yang sesungguhnya sarat dengan nilai-nilai keimanan (Tauhid).<sup>14</sup>

Pada tulisannya berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme,”

---

<sup>12</sup> Muhammad Roem, “*Lahirnya Pancasila 1945*”, *Tiga Peristiwa Bersejarah*, Jakarta: Sinar Hudaya, 1972, hlm. 24

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Re-So-Pim (Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional), *Amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961*

dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid 1, terlihat jelas upaya Soekarno mempertemukan aliran pemikiran yang oleh banyak kalangan mustahil dapat dipertemukan.<sup>15</sup>

Lalu mengapa Pidato 1 Juni 1945, prinsip Ketuhanan diuraikan paling terakhir dan prinsip Kebangsaan pada urutan pertama. Dengan melihat hal tersebut apakah Soekarno mengabaikan dimensi keimanan dalam menyampaikan prinsip-prinsip yang menjadi sila-sila dari Pancasila. Dari beberapa permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam lagi mengenai “*Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila*” yang berdasarkan pada sumber-sumber, informasi, maupun data-data yang relevan.

## **B. Kerangka Teori**

Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan teori yang dianggap relevan. Adapun teori yang digunakan teori dekonstruksi. Dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan

---

<sup>15</sup>Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1946

selalu kontekstual, anggapan selalu hadir sebagai kontruksi sosial dalam sejarah.<sup>16</sup>

Jacques Derrida menunjukkan bahwa seseorang selalu cenderung untuk melepaskan teks dari konteksnya. Satu term tertentu kita lepaskan dari konteks dan hadir sebagai makna final. Inilah Derrida sebut sebagai logosentrisme, yaitu, kecenderungan untuk mengacu kepada suatu metafisika tertentu, suatu kehadiran objek absolut tertentu. Dengan metode dekonstruksi, Derrida ingin membuat kita kritis terhadap teks.<sup>17</sup>

Tugas dekonstruksi adalah mengungkap problematika wacana-wacana yang dipusatkan, dipihak lain membongkar metafisika dengan mengubah batas-batasnya secara konseptual. Sedangkan tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan dibalik teks-teks.<sup>18</sup>

Melalui dekonstruksi Derrida yang pertamamenggunakan istilah “*Trace*”

---

<sup>16</sup>Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, (Jakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 19

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup> Nyoman Ratna Kutha, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra Dari Struktualisme Hingga Postruktualisme Perspektif Wacana Naratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 39

sebagai konsep dalam menelusuri makna. Menurut Derrida yang bisa dan ketahu adalah jejak-jejak dari kebenaran itu sendiri, dan bukan kebenaran pada dirinya sendiri. Trace (jejak) bersifat misterius dan tidak terungkap, muncul sebagai kekuatan dan pembentuk tulisan, menembus dan memberi energi pada aktivitasnya yang menyeluruh. Hal ini berarti bahwa makna akan bergerak, harus dilacak terus menerus. Yang kedua menggunakan istilah “*Differance*” yakni adalah kata yang aneh. Kata ini tidak terdapat dalam kamus bahasa manapun, kata itu terdiri dari dua kata yakni untuk membedakan (*to differ*), dan untuk menunda kepastian (*to defer*). Kebenaran dan makna di dalam teks harus terus dibedakan dan ditangguhkan kepastiannya (menangguhkan kebenaran dalam teks), Ketiga “*Rekonstruksi*” yakni membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Dan Yang keempat “*Iterabilitas*” yakni kemampuan suatu teks untuk selalu dimaknai terus menerus di dalam konteks yang berbeda-beda. Teks adalah suau yang lentur dan lincah, teks adalah tanda yang bisa terus diulang dan dibedakan sesuai

dengan horison pembaca dan penafsirannya.  
«19

Selanjutnya penulis mengikuti konsep *Iterabilitas* yakni melihat pemikiran Soekarno yang pada masa perumusan Pancasila dianggap paling penting diantara pemikir lainnya seperti M. Yamin dan Soepomo, dengan membuat perbandingan tiga tokoh tersebut untuk melihat titik singgung pada tiga tokoh Soekarno, Muh. Yamin dan Soepomo pada pemikirannya dalam merumuskan Pancasila, sehingga hasil akhir disebut dengan *Dekonstruksi* dengan mengetahui apakah Pancasila merupakan hasil mutlak dari pemikiran Soekarno sendiri.

### **C. Prinsip Dasar Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila**

Prinsip dasar pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila ialah sebuah pernyataan atau pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam menuangkan ide-ide Soekarno dengan benar dan tepat dalam merumuskan Pancasila guna mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama dan sesuai dengan tujuan bersama.

Selanjutnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Keniscayaan itu diperoleh manakala

ditinjau dari aspek yang melingkupinya, mulai dari etnis, bahasa, budaya, agama dan kelas sosial. Ini artinya, pluralitas atau keberagaman merupakan realitas bagi masyarakat Indonesia.

Dalam perumusan Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pemikirannya mengenai lima prinsip dasar yang menjadi point penting mengenai Pancasila. Point tersebut ialah sebagai berikut;

1. Prinsip pertama yang menjadi perhatian Soekarno adalah Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia).
2. Prinsip kedua yang diuraikan Soekarno adalah Internasionalisme. Internasionalisme yang dimaksud bukanlah kosmopolitanisme yang tidak menginginkan adanya kebangsaan. Internasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan Soekarno pada sila pertama.
3. Prinsip yang ketiga Soekarno menguraikan dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan.
4. Prinsip yang keempat yaitu Kesejahteraan. Dengan prinsip "*tidak*

---

<sup>19</sup>Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, (Jakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 23

*akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”.*<sup>20</sup>

5. Prinsip kelima yang diuraikan Soekarno adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Prinsip sila ke-Tuhanan YME (Ketuhanan Yang Berkebudayaan).<sup>21</sup>

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila” atas saran salah seorang teman beliau yang ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang meliputi: Sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta Ketuhanan. Berikutnya Soekarno juga mengusulkan “Tri Sila” tersebut juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah gotong-royong.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, hlm. 62

<sup>21</sup>Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, Jakarta : Yapeta Pusat, 1995, hlm. 63-64

<sup>22</sup>Soekarno, Lahirnya Pancasila, Dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1991), hlm. 21

Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Soekarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat “semua buat semua”. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu dan sebagai perekat kehidupan dan kepentingan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, Kemanusiaan (humanisme), Kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan. Ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat baru Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), *amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961*.



Selanjutnya uraian tentang sila-sila (prinsip) dari Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945, berbeda dengan tata urutan sila-sila sebagaimana tercantum dalam dokumen berikutnya, seperti Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sembilan, di dalam Pembukaan UUD 1945, maupun dalam pidato-pidato Soekarno di berbagai kesempatan. Namun semua itu, tidak mengurangi peran Soekarno sebagai “key person” dalam perumusan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, untuk dapat dipahami Pancasila perlu memahami logika pemikiran Soekarno yang sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman sejarah kehidupan bangsa ini.<sup>24</sup>

Urutan sila-sila Pancasila yang diucapkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 seperti yang telah penulis sebutkan yakni: (1). Kebangsaan Indonesia, (2). Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3). Mufakat atau Demokrasi, (4). Kesejahteraan Sosial,

(5). Ketuhanan.<sup>25</sup> Sedangkan urutan sila-sila Panitia Sembilan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya, tata urutan sila-sila Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Patut dipahami, formula dua tata urutan sila-sila dalam

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Soekarno, “*Lahirnya Pancasila*” Dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1961), hlm. 5

Pancasila yang terakhir disusun dengan mengacu kepada pidato Soekarno 1 Juni 1945, dan proses formulasi penyusunan juga melibatkan bahkan dipimpin oleh Soekarno. Bahwa ada perbedaan dalam tata urutan antara susunan pertama dengan yang kedua dan ketiga, itu terjadi karena pidato 1 Juni 1945 adalah pidato tanpa teks, merupakan curahan hati Soekarno yang disampaikan secara spontan, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dalam mengucapkan 1 Juni 1945, Soekarno tidak mementingkan sistematika, melainkan ia lebih mengutamakan pengungkapan setiap hari yang sesungguhnya gambaran dari Pancasila itu sendiri.<sup>26</sup>

#### **D. Analisis lima prinsip Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila**

Dalam hal perumusan Pancasila, Soekarno mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau *'philosophische grondslag'* juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai *'weltanschauung'* dan di atas dasar itulah kita dirikan negara Indonesia. sangat

---

<sup>26</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Paradigma, hlm.78

menarik untuk dikaji bahwa Soekarno dalam mengusulkan dasar negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya juga membandingkan dasar filsafat negara 'Pancasila' dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San min Chu dan ideologi besar dunia lainnya.<sup>27</sup>

Menurut Kahin yang dikutip oleh Suwarno, dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 itu sangat penting, sebab sila-sila yang diusulkan itu merupakan suatu filsafat sosial-politik yang matang yang sebenarnya juga diyakini oleh pemimpin-pemimpin nasionalis yang berpengaruh dan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh. Menurut Kahin tidak ada rumusan prinsip dasar negara yang lebih jelas dari pada perumusan Soekarno yang dapat dijadikan contoh sebagai suatu sintesis dari demokrasi Barat, Islam modern, Marxis, dan gagasan-gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan yang asli, yang merupakan dasar umum pemikiran sosial dari sebagian besar elit politik Indonesia setelah penjajahan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Paradigma, hlm.78

<sup>28</sup>P.J. sowarno, *Pancasila Budaya bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 96

Senada dengan Kahin, Bernhard Dham juga menilai bahwa sintesis yang dilakukan Soekarno sebagai suatu pemikiran besar, namun Dahm menekankan bahwa sintesis yang dilakukan oleh Soekarno itu berdasar filsafat Jawa yang diolah menjadi suatu rumusan besar tentang prinsip negara yaitu persatuan. Dia menekankan bahwa “semua hal adalah satu” yang merupakan suatu *local wisdom* serta kearifan orang Jawa.<sup>29</sup> Hal ini senada dengan prinsip integralistik yang dikembangkan dan diusulkan oleh Soepomo, atas dasar asumsi inilah maka Dahm menjelaskan mengapa Soekarno mengemukakan tiga alternatif, Pancasila, Trisila dan Ekasila. Dasar filsafat Jawa yang menginginkan persatuan itu menurut Dahm merupakan dasar pemikiran Soekarno untuk mengembangkan gagasan sintesis nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang dahulu populer disebut Nasakom.<sup>30</sup>

Tidak terbatas pada pemikiran tersebut ide kreatif Soekarno yang bercorak ‘*elektis inkorporasi*’ itu nampak juga dalam upayanya untuk mendapatkan rumusan humanisme dasar filsafat negara. Soekarno mensintetiskan

pemikiran Timur yaitu India dan Cina, dengan menawarkan filsafat humanisme Gandhi dan *San Min Chui* Sun Yat Sen. Pemikiran dan usulan Soekarno ini memang sangat strategis, sehingga tidak mengherankan mendapat sambutan dan dukungan secara aklamis.<sup>31</sup>

Dengan demikian melalui metode induktif dalam merumuskan Pancasila Soekarno telah mengamati sejarah perkembangan Indonesia, pengalaman politiknya sebagai tokoh pergerakan nasional, serta kemajemukan bangsa Indonesia sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang memiliki ciri *eklektis inkorporasi*, artinya menurut Notonagoro suatu **sintesis**

dari berbagai pandangan yang berbeda namun disatupadukan untuk suatu tujuan yang mulia. Demikian pula dalam hubungannya dengan nasionalisme E. Renan yang sangat menonjolkan faktor kehendak untuk bersatu, dengan mengesampingkan faktor perbedaan ras, etnisitas, maupun sosio-ekonomi yang hal ini sangat disadari benar oleh Soekarno bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia sebagai *founding fathers*, adalah lebih banyak perbedaannya (Notonagoro, 1980:102).

Untuk memantapkan semangat persatuan dalam melawan penjajah, maka dikembangkan pemikiran yang diangkat dari Otto Bauer, yang menekankan kesamaan perangai, watak serta rasa senasib yang merupakan faktor penting

---

<sup>29</sup>Bernard Dham, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 424

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 425

---

<sup>31</sup>Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 27

dalam kehidupan berbangsa yang merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disadari oleh Soekarno bahwa rakyat Indonesia pada waktu itu mempunyai nasib yang sama yaitu sebagai bangsa yang terjajah. Dasar pemikiran yang sintetis inilah yang dikembangkan Soekarno dengan mengangkat nasionalisme San Min Chu Sun Yat Sen, serta konsep teori geopolitik Bauer, mengingat konstelasi wilayah geografis negara, susunan elemen rakyat yang multi etnis sehingga sangat memerlukan suatu ikatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (P. J. Suwarno, 1993: 98).

Suatu pemikiran heuristik yang brilian dimana prinsip-prinsip dasar nasionalisme, geopolitik tersebut juga didasarkan pada nilai moralitas Ketuhanan Yang Maha Esa serta humanisme Gandhi yang sering diucapkannya “*My nationalisme is humanity*” selain itu sila-sila kerakyatan serta kesejahteraan rakyat (keadilan sosial) yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan suatu upaya Soekarno untuk mempersatukan pendapat yang saat itu berkembang (Kaelan, 2003: 28).

Mengenai pemikiran yang diajukan Soekarno pada masa perumusan Pancasila, penulis akan mengkaji atau menganalisa pemikiran Soekarno dari segi tekstual. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

## 1. Kebangsaan

Dalam pidato 1 Juni 1945 sila ketiga (persatuan Indonesia) dari Pancasila ini berada di urutan pertama dan pilihan kata yang dipakai Soekarno adalah kebangsaan. Kata ini diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI dan dimintakan persetujuan kepada para anggota sidang lain yang hadir. Kata kebangsaan ini harus dimengerti bahwa negara yang akan didirikan itu bukan untuk kepentingan seorang, bukan untuk kepentingan satu golongan (entah golongan bangsawan, golongan orang kaya, dan golongan satu agama) (Ign. Gatut, 2007: 75). Pemikiran kebangsaan yang merupakan sila Persatuan Indonesia, urutan ketiga dari Pancasila ini merupakan kekuatan yang dapat membakar dan menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan. Dengan nasionalisme ini bangsa Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, memberi kekuatan sepanjang kegelapan penjajahan yang lama, dan selama berkobarnya perjuangankemerdekaan. Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala di dada bangsa Indonesia dan tetap memberi kekuatan hidup bangsa (Ign. Gatut, 2007: 78).

Persatuan Indonesia adalah suatu cita-cita politik yang tidak mudah untuk direalisasikan pada kondisi masyarakat yang majemuk. Tantangan terbesarnya adalah proses membangun kesadaran berbangsa yang seiring dengan kesadaran berbudaya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa hakikat bangsa Indonesia terdiri atas bagian-bagian yaitu: orang-orang Indonesia, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku

bangsa, adapun wilayah terdiri atas pulau-pulau, kesemuanya itu dalam kesatuannya membentuk hal-hal yang baru yaitu negara baru dan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002: 271), bilamana bagian-bagian tersebut berdiri sendiri-sendiri maka akan bersifat lemah dan tidak memiliki arti dalam pengertian negara (Kaelan, 2002: 271). Prinsip kebangsaan merupakan pertama yang diajukan oleh Soekarno.

Selain itu, Soekarno juga terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat Sen yang berjudul “San Min Chi I” atau “The Three People’s” (Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, 1964: 23). Kebangsaan Soekarno semakin matang dengan pengaruh dari Mahatma Ghandi yang menyatakan bahwa “My nationalisme is humanity”. Kebangsaan yang diyakini Soekarno adalah kebangsaan yang berkeprimanusiaan, kebangsaan yang tidak meremehkan bangsa lain, kebangsaan yang bukan chauvinisme. Fahaman bangsa yang dimaksud adalah tidak dibangun atas dasar ras, suku bangsa kebudayaan ataupun agama tertentu (Soekarno, 1946: 24).

Nation yang dimaksud juga tidak hanya mendasarkan kepada paham satu kelompok manusia yang bersatu menjadi bangsa karena kehendak untuk bersatu (*le desir d’etre ensemble*) menurut Ernest

Renan, maupun berdasarkan paham persatuan watak yang timbul karena persamaan nasib (Soekarno, 1946: 24).

Dalam konteks itu, Soekarno menyadari bahwa persatuan nasional memerlukan “Identitas Nasional”. “Kepribadian Nasional” dan “Berkepribadian dalam Kebudayaan” (Kaelan, 2002: 271). Ia sangat memahami hakikat manusia ‘*monopluralis*’ atau majemuk tunggal, yang pada hakikatnya harus senantiasa ada dan terjelma dalam suatu perbuatan lahir dan batin sebagai penjelmaan kehendak yang selaras dengan akal dan rasa. Hasrat-hasrat perbuatan ini (hasrat kehendak) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri (makhluk individu), juga dalam kaitannya sebagai warga masyarakat (makhluk sosial), maupun dalam kaitannya dengan pribadi berdiri sendiri maupun makhluk Tuhan yang keseluruhannya itu sebagai satu kesatuan (tunggalan) ‘*monopluralis*’ (Yudi, 2010: 369). Hal ini membuat Indonesia bisa bertahan sampai saat ini dan bisa semakin kuat jika kita mengimplementasikan semangat kebangsaan menurut Soekarno tersebut.

Kemudian menyangkut rasa kebangsaan, Soekarno mengacu kepada realitas historis bangsa Indonesia yang telah terjajah sekitar 300 tahun. Sebagai bangsa yang pernah memiliki kejayaan masa lalu, di zaman Sriwijaya, Majapahit dan Mataram, tentulah tertanam dalam dirinya rasa keinginan kembali ke jati diri sebagai bangsa yang besar dan merdeka seperti sedia kala. Atau tegasnya kata Soekarno “Bangsa-bangsa yang demikian itu tidak boleh tidak tentu kalbunyaitu hidup dengan keinginan kembali kepada pribadi sendiri, yaitu yang dinamakan kebangsaan”( Hamka, 2011: 44).

Sebenarnya rasa kebangsaan yang dimaksud Soekarno itu telah lama diungkapkannya, yakni sejak tahun 1930 ketika ia menghadapi pengadilan Kolonial Belanda di Bandung. Di hadapan para hakim yang mengadilinya Soekarno menyatakan bahwa “*semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat ploreter di negeri-negeri industri, maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah semangat ingin merdeka.*” (Hamka, 2011: 44).

Rasa kebangsaan itu digali melalui penderitaan rakyat Indonesia, sebab dari penderitaan itu lahir keinginan melepaskan diri dari penjajahan dan kelak akan membangun kembali masa kejayaan seperti sedia kala. Maka rasa kebangsaan itu adalah juga berarti mengakui jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Untuk membangun kejayaan di masa depan, tidak hanya sekedar mengingat kejayaan masa lalu, tetapi harus dengan perjuangan untuk merdeka. Namun masa lalu itulah pembangkit semangat baru untuk berjuang bersama. Begitulah rakyat Indonesia, menurut Soekarno “*dengan mengetahui kebesaran hari dulu itu, lantas hiduplah rasa nasionalnya, lantas menyala lagilah api harapan di dalam hatinya.*” Dengan nasionalismenya yang menyala-nyala itu, maka rakyat Indonesia bisa mewujudkan kemerdekaannya. Dengan nasionalisme yang positif itu, maka rakyat Indonesia merasakan kebenaran pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme yang

demikian itu adalah sebenarnya diridhai Allah sendiri.

## 2. Internasionalisme

Pemikiran Internasionalisme ini pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 juga menempati urutan kedua dengan redaksi yang berbeda dengan rumusan resmi Pancasila 18 Agustus 1945. Pada waktu itu bunyi sila kedua yang yang di usulkan Soekarno adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan, yang dalam Pancasila adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pada pemikiran ini Soekarno memiliki tujuan bukan hanya membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang dalam era sekarang mungkin lebih tepat dikatakan usahamembangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia (Ign. Gatut, 2007: 68-69).

Pemikiran Internasionalisme atau perikemanusiaan digali oleh Soekarno dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Sejak beratus bahkan beribu tahun lalu agama Hindu telah mengajarkan *Tat Twam*

*Asi* (Dia adalah aku, aku adalah dia) dikalangan masyarakat Indonesia, yang tidak lain adalah rasa kemanusiaan itu sendiri. Kemudian datang pula agama Islam mengajarkan pelayanan sosial yang disebut *fardhu kifayah* (kewajiban yang dilakukan untuk kepentingan umum) yang biasanya dilakukan secara kolektif atau gotong royong oleh masyarakat. Ajaran ini lebih memperkokoh rasa kemanusiaan dalam sanubari bangsa Indonesia. sementara itu, datang pula Kristen mengajarkan cinta kasih untuk sesama manusia dikalangan bangsa Indonesia. bahwa sesama manusia harus saling mencintai seperti mencintai diri sendiri. Dalam Islam sebenarnya ajaran inipun ada, sebagaimana sabda Nabi Muhammas SAW, “*Tidak beriman seorang dari kamu sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri*” (Hamka, 2011: 43).

Oleh karena itu, rasa kemanusiaan bukan ciptaan Soekarno melainkan suatu persaan yang telah tumbuh ditengah masyarakat bangsa Indonesia, baik

sebelum datangnya agama-agama besar monoteisme maupun sesudah kedatangan mereka. Soekarno mengaku hanya sebagai penggali dari perasaan bangsa Indonesia itu. Sebab katanya “....jikalau aku menggali rasa perikemanusiaan di dalam bumi Indonesia itu adalah hal yang tidak mengherankan. Sebagaimanjuga tidak mengeherankan jikalau aku menggali rasa Ketuhanan di dalam bumi Indonesia.” (Hamka, 2011: 43).

Asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak

seimbang dalam kehidupan sosial (Hamka, 2011: 43).

Pada pasal kedua ini, kematangan pemikiran Soekarno sangat terlihat dengan tidak terjebak pada pemahaman kebangsaan yang sempit yang ia kemukakan diawal yang menurutnya Indonesia juga bagian dari dunia Internasional, sehingga ia menyampaikan kepada peserta sidang BPUPK bahwa Indonesia harus mengakui keberadaan bangsa lain dan harus menciptakan persatuan dan persaudaraan dunia.

Menurut Soekarno Internasionalisme yang dimaksud sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan sila pertama. Tujuannya dengan melontarkan prinsip ini adalah bukan sekedar membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdakkan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa (Syamsuhadi, 1995: 58-59). Dalam era sekarang lebih tepat dikatakan sebagai usaha membangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia. Menurut Soekarno,



Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme dan begitupun sebaliknya nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.

Pada intinya Soekarno menegaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak mungkin untuk hidup sendiri dan terasing dari bangsa-bangsa lain di dunia. Yang menurut Soekarno pada hakikatnya umat manusia sekarang ini terdiri dari berbagai bangsa-bangsa, terutama pada abad kedua puluh ini tidak dapat kita bayangkan adanya suatu bangsa yang dapat hidup dengan tiada hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia merupakan suatu *homo socius*. Demikian pula bangsa tak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup di dalam masyarakatnya bangsa-bangsa (Soekarno, 1946, hlm 51).

### 3. Demokrasi

Pemikiran Demokrasi Soekarno pada pidato 1 Juni 1945 dinamai sila *mufakat* atau *demokrasi* yang dalam Pancasila terdapat pada urutan ke empat dengan sila

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dijelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara “satu buat semua, semua buat satu”. Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Bangsa Indonesia telah sejak dahulu kala menerapkan cara-cara bermusyawarah dalam membahas persoalan masyarakat. Musyawarah sebenarnya merupakan cara bernegara dan bermasyarakat secara demokrasi dikalangan masyarakat kita di zaman dahulu, walaupun mereka hidup dalam kerajaan atau kesultanan. Praktik demokrasi semacam itu mendahulukan segala teori demokrasi Barat, seperti kata Soekarno;

“Sebelum ada teori-teori *Montesqieu, Voltaire, Rousseau*, sebelum teori *Trias Politica*, sebelum ada parlemen-parlemen di dunia Barat, kita sudah menjalankan demokrasi di dalam bentuk secara kuno. Tetapi demokrasi telah ada. Oleh karena itu rasa demokrasi ini tidak asing lagi bagi kita.”(Soekarno, 1946: 52).

Negara persatuan dari kebangsaan multikultur bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*) dan kelompok masyarakat (*collective right*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Yudi, 2010: 383).

Prinsip pemerintahan mayoritas berdasar kesetaraan hak-hak warga negara dengan menghormati hak-hak minoritas (*majority rule, minority rights*) mengandaikan adanya kedaulatan

rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan. Masalah multikulturalisme bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warganegara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercabut dari akar-akar sosialnya. Pengakuan terhadap hak-hak budaya kelompok etnis, terutama golongan minoritas perlu diberikan sebagai prakondisi menuju pembentukan individu warga negara yang bisa melampaui identitas etniknya (*post ethnic condition*).

Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Yudi, 2010: 383).

Pernyataan tersebut merupakan sikap tegas Soekarno sebagai seorang muslim yang tegas menjunjung tinggi pluralitas masyarakat Indonesia. karena

demokrasi dalam pemikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka perwujudan demokrasi itu hendaknya diletakkan berdasarkan keperibadian bangsa Indonesia sendiri dan cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Yudi, 2010: 476). Ia juga menyerukan kepada kelompok Islam dan Kristen untuk bekerja sehebat-hebatnya, agar kursi-kursi badan perwakilan rakyat diduduki oleh beberapa perwakilan, baik perwakilan Islam maupun perwakilan Kristen.

Maka dalam hal ini rakyat akan memberikan penilaian sendiri kepada wakil-wakilnya yang benar-benar mempresentasikan kedaulatan rakyat bukan memeralat rakyat untuk mencapai tujuannya. Selain itu rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.

#### 4. Kesejahteraan

Dalam pidato 1 Juni 1945 prinsip “Kesejahteraan” yang disampaikan Soekarno tersebut teletak pada Pancasila terletak pada urutan kelima, yakni sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. secara ringkas prinsip kesejahteraan ini diartikan oleh Soekarno sebagai prinsip “tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia”(Ing. Gatut, 2007: 81).

Sila keadilan sosial, Soekarno menggalinya dari budaya bangsa yang telah ada sejak zaman keemasan masa lalu, dibawah kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sejumlah kesultanan, baik di Jawa maupun diluar Jawa bahwa kitab-kitab zaman kuno mengingatkan kita akan zaman yang makmur itu: *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, sebuah ungkapan Jawa yang melukiskan suasana masyarakat Indonesia yang dahulu kala negerinya subur, makmur, teratur, tentram dan aman sejahtera, jauh sebelum penjajah menguasai negeri ini, dan itu pula yang akan diwujudkan kembali di

masa depan Indonesia merdeka (Hamka, 2011: 46).

Suasana kemakmuran di atas telah sangat jauh berubah setelah bangsa Indonesia hidup sengsara dalam penjajahan di bawah kekuasaan imperialisme dan kolonialisme. Bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan berharap kembali pada kejayaan seperti sediakala dan lepas dari alam kesengsaraan dibawah penjajahan, maka bersemilah rasa keadilan sosial dikalangan bangsa Indonesia, yaitu hasrat ingin untuk merdeka guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. Perasaan seperti inilah yang digali Soekarno untuk kemudian dijadikan salah satu sila dari Pancasila. kandungan sila tersebut tidak lain dari suatu idealisme yang tumbuh di masyarakat.

Soekarno menginginkan agar konsep demokrasi bisa bersinergis-mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia. ia menawarkan kalau nanti mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, melainkan sistem permusyawaratan

yang memberi hidup, yakni politik-ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Pernyataan Soekarno tersebut seyogyanya tidak dipandang dari kecenderungan utopismenya, melainkan dari segi tekadnya yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial diseborang jembatan emas kemerdekaan. Pencapaian tugas luhur itu tidak dipercayakan pada *laissez fair* yang berbasis individualisme-kapitalisme, karena Indonesia mengalami pengalaman buruk penindasan politik dan kemiskinan ekonomi yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Sementara, kolonialisme itu sendiri merupakan perpanjangan dari individualism-kapitalisme, menurutnya bahwa keadilan sosial adalah “proses kita yang maha hebat kepada individualisme”(Yudi, 2010: 583). Hasil refleksi tersebut membuat Soekarno menginginkan seluruh rakyat Indonesia sejahtera tanpa memandang kelas sosial yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai “negara liberal” melainkan sebagai “negara kesejahteraan” (negara sosial). Dalam pemikiran para pendiri bangsa, negara kesejahteraan tersebut yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan Indonesia, yang dituntut oleh etika politiknya bukanlah penghapusan hak milik pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial, dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat (Yudi, 2010: 585).

## 5. Ketuhanan

Dalam sila Ketuhanan Soekarno mengaitkannya dengan kenyataan geografis dan tradisi

religius kehidupan bangsa Indonesia yang agraris. Bahwa bangsa agraris, di manapun mereka berada akan pasti menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan peternakan. Kehidupan agraris sangat ditentukan oleh kondisi alam di luar jangkauan daya manusia. Maka sebagai manusia yang mengakui kelemahannya, bangsa Indonesia sejak dahulu kala meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kepadaNya mereka menggantungkan nasib dan berdoa akan kemaslahatan hidup.

Prinsip ketuhanan dalam pidato 1 Juni 1945 terletak pada urutan ke-5. Dimana dalam Pancasila pemikiran ketuhanan ini terletak pada urutan pertama. Namun Soekarno bermaksud dengan prinsip kelima ini hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ing. Gatut, 2007: 65). Soekarno dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut

petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!” (Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, 2010: 29-30).

Prinsip yang diuraikan Soekarno tentang ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan adalah agar bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan Tuhannya sendiri-sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinan Soekarno telah berpikir ke depan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya, sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia (Syamsuhadi, 1995: 63-64).

Dalam konteks pemikiran Soekarno, bahwa substansi nasionalisme; seperti cinta tanah air, patriotisme, perikemanusiaan dan pembebasan merupakan persoalan mu’amalah yang termasuk dalam kategori ajaran Islam dimensi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya menyediakan ajaran-ajaran komprehensif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agama (*fiqh*), dogma (*tauhid*), dan etika (*akhlak*), akan tetapi juga dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan masalah-masalah keduniawiaan (Muhammad A.S, 2000: 23).

Islam merupakan suatu pergaulan hidup yang memberi hak seimbang serta kewajiban yang sama. Peraturan yang terkandung dalam Islam sangat heterogen, dari masalah ke-Tuhanan sampai pada persoalan tatanan rumah tangga hingga mengurus hubungan dengan mereka yang berlainan agama dan berlainan negeri serta mendorong semangat untuk mencapai derajat kemanusiaan. Dalam hal ini

Mohammad Natsir sebagaimana dikutip Dwi Purwoko dalam “*Negara Islam*”, mengatakan bahwa tidak perlu seorang muslim menghilangkan rasa kebangsaan dan kebudayaan. Karena Ajaran Islam juga mengakui bahwa manusia dijadi dalam bergolongan-golongan, bangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Hal tersebut merupakan fitrah (Dwi, 2001: 78).

Cinta tanah air adalah fitrah manusia, cinta tanah air merupakan cinta kepada seluruh rakyat yang tinggal di atas air itu (Nur, 2001: 128). Implikasi dari cinta itu, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya.

Perumusan Pancasila sendiri yang beliau usulkan mampu diterima sebagai ideologi negara walaupun terdapat pembenahan dalam pengurutan dan peristilahan. Dengan melihat akar pemikiran Soekarno adalah nasionalisme, maka Soekarno meletakkan nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) dalam urutan pertama dengan maksud untuk menyatukan kondisi masyarakat Indonesia

adalah masyarakat yang majemuk atau plural. Pada urutan kedua tentang Internasionalisme Soekarno ini sangat berkaitan dengan prinsip Kebangsaan. Yang bermaksud menjaga pluralitas negara Indonesia. dan menjaga hubungan bangsa dalam negeri dengan bangsa-bangsa luar negeri hingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dengan subur.

Kemudian Pada urutan ketiga adalah demokrasi yang merupakan pemikiran tegas Soekarno sebagai seorang muslim, dengan meletakkan demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah keberagaman yang nantinya mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya mengenai pemikiran kesejahteraan hal ini mengingat Indonesia mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi yang ditimbulkan oleh kolonialisme maka dengan prinsip ini Soekarno berharap bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera tanpa memandang adanya kelas sosial.

Yang terahir adalah prinsip Ketuhanan, Soekarno bermaksud meletakkan prinsip Ketuhanan pada urutan terahir ialah sebagai pengokoh atau penguat dari prinsip-prinsip sebelumnya. Pada prinsip Ketuhanan ini penulis melihat bahwa Soekarno berharap masyarakat Indonesia semuanya bertuhan dan negara Indonesia memberi kebebasan pada rakyatnya untuk bertuhan sesuai dengan agama yang diyakini tanpa ada unsur paksaan.

Setelah dilakukan rekontruksi, diketahui bahwa saat proses perumusan Pancasila tahun 1945 terdapat beberapa tokoh yang menonjol dalam menyampaikan pidato-pidatonya. Yakni pidato Mu. Yamin tanggal 29 Mei 1945, Soepomo tanggal 31 Mei 1945 dan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Terlihat pidato Soekarno yang tampak paling akhir, namun pidato Soekarno juga yang di sambut secara aklamis pada sidang-sidang perumusan dasar negara tersebut. jika dilihat terdapat titi singgung atau keterkaitan pidato antar tokoh tersebut.

## **E. Kesimpulan**

Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila berdasarkan teori dekontruksi maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukanlah sekedar preferensi Soekarno semata, namun terdapat sumbangan pemikiran tokoh lainnya yakni Soepomo dan Yamin. Hal ini dilihat dari adanya kesamaan dalam pidato tiga tokoh tersebut. serta rentang waktu pidato Soekarno paling akhir menunjukkan bahwa pidato Soekarno merupakan cakupan atau pelengkap dari pidato sebelumnya. Pemikiran soekarno tentang asas Ketuhanan yang terletak diakhir bukan berarti Soekarno mengabaikan dimensi keimanannya namun melihat kondisi bangsa Indonesia pasca merdeka dari jajahan Jepang kembali mendapat ancaman jajahan dari bangsa Belanda maka Soekarno berupaya membangun semangat bangsa Indonesia dengan meletakkan asas nasionalisme pada urutan pertama, prinsip Ketuhanan diletakkan pada urutan terahir justru sebagai pengunci dan penguat asas-asas sebelumnya untuk dijalankan berdasarkan Ketuhanan.



## Daftar Pustaka

- Amir, Zainal Abidin dkk, *Soekarno, dan NU Titik Temu Nasionalisme*, 2013, Yogyakarta: LkiS
- Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, 1999, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia : Kumpulan Karangan*, 1978, Jakarta : P.T Gramedia
- Ahmad, Nur, (ed), *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keberagamaan*, 2001, Jakarta: Buku Kompas
- Dham, Bernhard, *Soekarno dan Perjuangan. Terj. Hasan Basari*, Jakarta: LP3ES. 1987
- Daman, Rozikin, 1995, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yamin, Mohammad, 1995, *Pembahasan UUD Indonesia*, Jakarta: Prapanca
- D. Legge, John, *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*, 2001, Jakarta: Sinar Harapan
- Dham, Berhan, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, 1987, Jakarta: Penerbit LP3S
- Elibrahim, *Soekarno-Hatta Sang Proklamator*, 2011, Jakarta: CV Arya Duta
- Gatut Saksono, Ign, *Pancasila Soekarno*, 2007, Yogyakarta: CV. URNA CIPTA MEDIA JAYA
- Hikam, Muhammad A.S, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, 2000, Jakarta: Erlangga
- Hatta, Mohammad, Dalam Panitia Lima, 1984 *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara
- Hatta, Mohammad dkk, 1977, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara
- Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, 2011, Jakarta: RMBOOKS
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, 2013, yogyakarta: PARADIGMA
- , *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma
- Kusuma, RM, A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, 2009, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI
- Kasenda, Peter, *Soekarno Muda; Biografi Pemikiran 1926-1933*, cet. 2, 2014, Depok: Komunitas Bambu
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna*, 2011, Jakarta: Gramedia
- , *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, cet. II, 1985, Jakarta: Penerbit LP3ES

Notonagoro, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*,

Yogyakarta: Fakultas Filsafa

-----, *Beberapa Hal Mengenai*

*Falsafah Pancasila*, Cet. 9, 1980 Jakarta:

Pantjuran Tujuh

Norris, Chistopher, 2003, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, Jakarta: Ar-Ruzz

*Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 1975, Jakarta: Pantjuran Tujuh

Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, *Tjamkan Pnatja Sila, Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 1964, Djakarta: Panitia Nasional Lahirnja Pantja Sila

Rahardjo, Dawam, *Bung Karno sebagai Pemikir Islam, Opini, 19 November 2010*, Sumber Paramadina.com

-----, Bambang, Syamsuhadi, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, 1995, Jakarta : Yapeta Pusat

-----, M. Dawam , *Esei-esei Ekonomi Politik*, 1985, Jakarta: LP3ES

Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), *amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia*

*tanggal 17 Agustus 1961 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, 1995, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1972, *Tiga Peristiwa Bersejarah*, Jakarta: Sinar Hudaya.

-----, “Lahirnya Pancasila 1945”, *Tiga Peristiwa Bersejarah*, Jakarta: Sinar Hudaya

Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi

-----, *Kewajiban Wanita Dalam Perdjoengan Republik Indonesia*, 1963, Jakarta: Panitia Penerbit Karangan Presiden Soekarno

-----, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo

-----, *Pancasila sebagai Dasar Negara*, II, Jakarta: Kementrian Penerangan, tt

-----, *Pancasila dan Perdamaian Dunia ; Sebuah Kumpulan Pidato*, 1988, Jakarta: Inti Idayus Press-Yayasan Pendidikan Soekarno

-----, 1951, *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Jakarta: S. K Seno

Saifuddin Anshari, Endang, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, 1997, Jakarta: Gema Insani Press

Soemhadiwidjojo, Rhien, *Bung Karno Sang Singa Podium “Revolusimu Belum*

- Selesai” 2013, Yogyakarta: Second Hope
- Soemoha diwidjojo,Rhien, *Bung Karno Sang Singa Podium;Revolusimu Belum Selesai*, 2013, Yogyakarta: Secondihope
- Sjamsuddin, Nazaruddin,*Soekarno; Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, 1993, Jakarta: Rajawali Pers
- Saifuddin Anshari, Endang , 1997, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar*
- Saksono,Gatut, *Pancasila Soekarno*, 2007, Yogyakarta: CV. URNA CIPTA MEDIA JAYA
- Sowarno, P.J, *Pancasila Budaya bangsa Indonesia*, 1993, Yogyakarta: Kanisius
- Suhelmi,Ahmad,*Soekarno Versus Natsir*, 1999, Jakarta: Darul Falah
- The History and the role of Departement of Religious Affairs of the Republik of Indonesia*, , 1975, Jakarta: Bureau of Public Relation, Departement of Religious Affairs
- Yamin, Muhammad (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I
- , *Pembahasan UUD Indonesia*, 1959, Jakarta: Prapanca